

REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF PEREMPUAN

Mafatihul Ulum

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The objective of the study was to analyze the recruitment of female candidate legislative candidates in the Golongan Karya Party, the Democratic Party, and the Justice and Unity Party of Indonesia in the Lingga Regency of Riau Islands Province. The method used is a qualitative approach, in which the data collected is not a number, but the data comes from interviews, personal documents, memos and other official documents. The results showed that in selecting and assigning women candidates to the Golkar Party, the Democratic Party, and the Indonesian Justice and Unity Party prioritize women cadres sourced from party membership. These three political parties have the same difficulties in the availability of women candidates candidates who want to be nominated. The Golkar Party and the Democratic Party have the same problem in which both parties have female cadres but are not willing to be nominated, thus making the party take steps to recruit women candidates from outside the party. While PKPI candidates recruitment is sourced from outside the party.

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis rekrutmen poliitik calon legislative perempuan pada Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik ini memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan. Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat memiliki masalah yang sama dimana kedua partai tersebut memiliki kader perempuan namun tidak bersedia untuk dicalonkan, sehingga membuat partai mengambil langkah untuk merekrut caleg perempuan dari luar partai. Sedangkan rekrutmen caleg PKPI memang bersumber dari luar partai.

Kata Kunci: rekrutmen politik, caleg perempuan, partai politik

PENDAHULUAN

Pada pemilu legislatif di Indonesia, calon anggota legislatif perempuan memiliki keistimewaan khusus dengan modal *affirmative action* yang memberikan sebuah kondisi khusus agar perempuan dapat lebih berpartisipasi dalam politik aktif. *Affirmative action* tersebut lebih dikenal dengan “kuota” untuk perempuan mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan calon yang didaftarkan bahkan dalam kepengurusan partai politik. *Affirmative action* ini diatur di dalam UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

Pada kontestansi pemilu, kualitas caleg yang dicalonkan oleh partai politik menjadi hal utama yang menarik perhatian pemilih. Parpol sebagai peserta pemilu memiliki kewenangan dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak

untuk maju dalam pemilu. Kewenangan ini berwujud penetapan caleg yang akan mengikuti pemilu. Penetapan caleg ini diadakan dalam sebuah proses rekrutmen politik internal partai. Proses rekrutmen ini bertujuan menyeleksi orang-orang yang ingin ikut serta dalam pemilu dan mampu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan partai. Maka dari itu rekrutmen politik di dalam partai politik menjadi sebuah proses yang sangat vital. Proses rekrutmen politik di dalam partai berbeda-beda dan dalam setiap partai akan menghasilkan caleg dengan kualitas yang bervariasi pula tergantung dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing parpol.

Jumlah caleg perempuan yang diikutsertakan partai politik pada pemilu 2014 di Kabupaten Lingga jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah caleg laki-laki. Perbedaan jumlah

ini memunculkan pandangan status caleg perempuan sebagai pelengkap kuota dan tidak direkrut dengan baik. Jumlah suara caleg perempuan yang berjumlah 4.954 suara juga menunjukkan sebuah fenomena, dimana lebih dari setengah suara tersebut dimiliki oleh caleg perempuan dari partai Golkar yakni Seniy dengan 2612 suara. Seniy juga merupakan satu-satunya caleg perempuan yang mampu memperoleh kursi.

Selain itu penempatan nomor urut terhadap caleg perempuan pada semua partai menunjukkan tidak ada satupun caleg perempuan yang menduduki nomor urut 1. Mayoritas caleg perempuan berada pada nomor urut 3, hanya satu orang caleg yang berada pada nomor urut 2. Selain itu juga, penempatan caleg perempuan dalam daftar caleg yang sebagian besarnya membentuk pola nomor urut 3, 6, 9. Pola ini semakin menguatkan bahwa keikutsertaan caleg perempuan hanya sebagai pelengkap kuota. Hal ini karena, di dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat aturan yang mengharuskan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Fenomena lain pada pileg Kabupaten Lingga tahun 2014 adalah dimana caleg perempuan yakni Seniy mampu memperoleh suara terbanyak tidak di antara seluruh caleg yang mengikuti pileg di Kabupaten Lingga. Perolehan suara Seniy mengalahkan perolehan suara caleg-caleg lain yang merupakan anggota DPRD Lingga periode sebelumnya, termasuk di dalamnya Ketua DPRD Kabupaten Lingga pada periode sebelumnya yang juga berasal dari Partai Golkar.

Keberhasilan Seniy memperoleh kursi menunjukkan keberhasilan Partai Golkar dalam merekrut caleg perempuan, dimana pada periode sebelumnya DPRD Kabupaten Lingga mengalami kekosongan anggota perempuan. Sepanjang Kabupaten Lingga berdiri, hanya terpilih dua orang anggota DPRD Lingga yang berjenis kelamin perempuan. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap caleg perempuan yang mampu bersaing dalam pemilu.

Selain fenomena di atas, perbandingan

jumlah pemilih perempuan dan laki-laki yang tidak jauh berbeda ternyata tidak menjadikan partai politik memperbanyak caleg perempuannya. Jumlah pemilih laki-laki 34.529 orang, sementara pemilih perempuan berjumlah 32.519 orang semestinya dapat menjadi pertimbangan parpol. Hasil pemilihan juga menunjukkan bahwa banyaknya pemilih perempuan tidak langsung berimbas kepada jumlah suara yang diperoleh oleh caleg perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk melihat dan menganalisa peranan partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yakni dengan menggunakan model analisis interaktif dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang penulis peroleh selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaan masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai rekrutmen terhadap caleg perempuan di Kabupaten Lingga pada Pemilu Tahun 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan

Norris telah menyebutkan adanya empat level rekrutmen, dimana level pertama menurutnya adalah *The Political System*. Sejalan dengan itu, sistem Politik di Indonesia telah dengan jelas menempatkan sebuah kuota 30% perempuan

dalam pencalonan calon anggota legislatif di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Maka dari itu seluruh parpol peserta pemilu wajib mengikuti kuota yang ditetapkan tersebut sebagai syarat untuk ikut serta dalam pemilu. UU No. 08 Tahun 2012 juga menjadi penopang utama dalam proses rekrutmen terhadap calon anggota legislatif perempuan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian jelas bahwasanya struktur peluang untuk caleg perempuan agar diikutsertakan dalam pemilu pada level ini telah terpenuhi dan bersifat final.

Rekrutmen Politik oleh Partai Golkar

Partai Golkar mencalonkan 20 orang caleg yang terbagi atas 10 orang caleg untuk daerah pemilihan Lingga 1 dan 10 orang caleg untuk daerah pemilihan Lingga 2. Kriteria rekrutmen caleg Partai Golkar adalah dengan memperhatikan pertimbangan sbb: Kuota 30% sesuai UU No. 08 Tahun 2012; Memungkinkan merekrut caleg dari luar kenaggotaan partai dengan kuota 10% setiap dapil; dan Masa pengabdian di dalam Partai Golkar.

Seleksi rekrutmen Partai Golkar dimulai dari Pengurus Kecamatan. Dari PK akan diusulkan beberapa nama yang dianggap kompeten untuk dimasukkan sebagai caleg. Proses ini juga meliputi aspirasi masyarakat yang ingin mengusulkan caleg. Usulan tersebut akan dimasukkan ke dalam pertimbangan pengurus tingkat kabupaten atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Lingga. Pada proses ini nama-nama tersebut didiskusikan dan dipertimbangkan sebaik-baiknya siapa-siapa saja yang akan diusulkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah pada tingkat provinsi atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Kepulauan Riau. Di tingkat provinsi ini nama-nama yang diusulkan tersebut dikerucutkan menjadi caleg tetap sesuai dengan kebutuhan partai. Pada tahap ini hanya diikuti oleh kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten..

Ketersediaan bakal calon legislatif perempuan bersumber dari organisasi internal Partai Golkar. Organisasi yang dimaksud adalah diantaranya IPPG (Ikatan Istri Partai Golkar) dan KPPG

(Kumpulan Perempuan Partai Golkar). Namun ternyata kader yang terdaftar sebagai anggota Partai Golkar tidak berminat ketika ditawarkan menjadi caleg. Sejalan dengan pendapat Norris bahwa ketersediaan calon yang akan diajukan juga dipengaruhi oleh motivasi dan modal politik. Maka dari itu dengan sangat kurangnya motivasi dari kader-kader perempuan internal Partai Golkar untuk diikutsertakan dalam pemilu menjadi berdampak pada level rekrutmen Partai Golkar selanjutnya.

Partai Golkar yang memprioritaskan kader internal partai telah memberikan hak untuk diutamakan kepada kader perempuan yang telah ikut serta dalam aktivitas kepartaian. Akan tetapi hak ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh kader perempuan dan menyebabkan Partai Golkar mau tidak mau menjadi mengabaikan kriteria rekrutmennya karena pertimbangan aturan pemilu yang mengharuskan keikutsertaan 30% caleg perempuan.

Pada level ini seharusnya partai menetapkan tuntutan kepada bacaleg agar menjadi target yang harus dapat dipenuhi pada pemilu. Akan tetapi dari hasil wawancara bersama sekeretaris Partai Golkar Kabupaten Lingga diketahui bahwa partai tidak membebaskan tuntutan tertentu kepada caleg perempuan. Hal ini karena dipengaruhi oleh level rekrutmen sebelumnya dimana Partai Golkar kesulitan menemukan caleg perempuan, sehingga tidak ingin semakin memberatkan caleg perempuan dalam perjuangan maju dalam pemilu. Pada akhirnya caleg perempuan dari Partai Golkar direkrut dengan tidak dibebankan target-target tertentu semisal target perolehan suara.

Rekrutmen Politik oleh Partai Demokrat

Partai Demokrat telah merekrut 20 orang caleg yang terdiri dari 10 orang caleg untuk daerah pemilihan Lingga 1 dan 10 orang lainnya untuk daerah pemilihan Lingga 2. Partai Demokrat memiliki pola dan prosedur tertentu. Sebagian besar urusan rekrutmen Partai Demokrat diurus oleh pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Lingga dan dibagi urusannya pada pengurus yang masing-masing berdomisili pada Daerah Pemilihan Lingga 1 dan Daerah Pemilihan Lingga 2.

Partai Demokrat Lingga sejatinya memprioritaskan kader-kader yang sudah lebih dulu aktif dan berpengalaman. Partai Demokrat sangat mempertimbangkan faktor berapa lamanya pengabdian kader dan aktif di dalam partai sehingga menjadi pilihan utama ketika akan dicalonkan sebagai caleg. Khusus untuk caleg perempuan, Partai Demokrat mengupayakan caleg perempuan dari luar partai. Walaupun pada dasarnya caleg-caleg perempuan tersebut sudah ditetapkan sebagai anggota partai menjelang pemilu dilaksanakan, namun sebenarnya caleg perempuan tersebut baru bergabung dengan partai menjelang akan dilaksanakan pemilu.

Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan daerah domisili caleg perempuan yang bersangkutan. Menurut Partai Demokrat, domisili caleg sangat mempengaruhi persebaran suara yang akan diperoleh. Misalnya, dalam pertimbangan rekrutmen diprioritaskan setidaknya satu orang caleg perempuan yang berdomisili di Daik Lingga, satu orang berdomisili di Lingga Utara dan sekitarnya, lalu satu orang berdomisili di Senayang dan sekitarnya. Pertimbangan ini berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Lingga yang berbentuk kepulauan dan terdiri atas dua pulau utama, yakni Pulau Lingga dan Pulau Singkep. Alasan lainnya ialah agar tidak semakin ketatnya persaingan antar caleg perempuan Partai Demokrat di daerah yang sama.

Dalam hal merekrut caleg perempuan, Partai Demokrat memberikan sebuah keistimewaan khusus dengan menyediakan fasilitas kampanye bagi caleg perempuan yang ingin mencalonkan diri dari partai demokrat. Fasilitas ini bertujuan menarik minat dan mempermudah langkah caleg perempuan mengingat sulitnya partai dalam mencalonkan caleg perempuan untuk memenuhi kuota 30%. Pada perekrutan di dapil Lingga 1, caleg perempuan diberikan bantuan berupa fasilitas kampanye berbentuk spanduk, baliho, dll yang disediakan oleh partai. Upaya ini dilakukan untuk menarik hati perempuan yang ingin menjadi caleg.

Partai Demokrat mengakui ada perbedaan yang sangat besar dalam hal ketersediaan kandidat yang ingin dicalonkan. Partai secara konsisten ingin menegakkan rekrutmen yang berbasis

kaderisasi, namun kondisi ideal dalam menjalankan hal tersebut sulit untuk partai penuhi. Partai Demokrat memiliki kader-kader yang bisa dikatakan cukup aktif dalam keanggotaan partai, akan tetapi kader-kader tersebut menolak ketika akan dicalonkan menjadi calon anggota legislatif. Kondisi ini karena faktor psikologi perempuan yang pemalu dan tidak percaya diri. Selain itu, ada perbedaan yang cukup signifikan antara caleg perempuan dari dapil Lingga 1 dan dapil Lingga 2 dimana perempuan dari dapil Lingga 2 lebih siap bersaing.

Rekrutmen Politik PKPI

Proses rekrutmen di dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Kabupaten Lingga secara umum ditanganani oleh Syafruddin H. Abd. Gani. Dalam wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan bahwa sejak awal kondisi PKPI sudah tidak ideal dalam menghadapi Pemilu 2014. Kondisi PKPI yang tidak ideal itu menurutnya membuat fungsi rekrutmen partai tidak dapat berjalan sebagaimana layaknya.

Sejak awal PKPI memang sudah sangat berat langkah ketika ingin mengikuti pemilu. Menurutnya beban tersebut tidak hanya terjadi di tingkat daerah saja namun juga di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi mengingat bahwa PKPI baru ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 pada detik-detik terakhir menjelang pemilu akan dilaksanakan. Keikutsertaan PKPI ini baru diumumkan pada tanggal 25 Maret 2013 oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, sedangkan Pemilihan Umum 2014 akan dilaksanakan pada 09 April 2014. Keadaan tersebut menurutnya sangat mengganggu persiapan khususnya bagi PKPI Kabupaten Lingga, sebagaimana disampaikan oleh Syafruddin H. Abd Gani.

PKPI hanya ingin menunjukkan eksistensi partai sehingga tidak menetapkan target apapun kepada caleg, tidak hanya caleg perempuan tetapi juga caleg laki-laki. Kondisi ini juga menjadikan rekrutmen PKPI tidak bersumber dari ketersediaan kader dan lebih banyak merekrut caleg dari luar partai. Caleg-caleg perempuan tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang pencalonannya sebagai calon anggota legislatif. Sehingga sangat terasa bahwa rekrut-

men diadakan hanya untuk melengkapi kuota 30% perempuan saja.

Rekrutmen caleg perempuan PKPI secara keseluruhan bisa dikatakan bersumber dari eksternal partai. Rekrutmen ini bahkan menghasilkan caleg perempuan yang tidak memiliki pengalaman dan motivasi politik. Para calon anggota legislatif perempuan dari PKPI mengaku bersedia ditempatkan sebagai caleg hanya untuk membantu PKPI yang kesulitan mencari caleg perempuan. Bahkan caleg perempuan PKPI mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui status dan langkah selanjutnya dari pencalonannya tersebut.

Caleg perempuan PKPI mengatakan bahwa mereka hanya diminta untuk melengkapi syarat-syarat berupa daftar riwayat hidup. Setelah itu mereka tidak paham langkah apa lagi yang dilakukan karena partai tidak lagi menghubungi setelah masuk ke daftar caleg dan memperoleh nomor urut. Pada akhirnya suara yang diperoleh caleg-caleg perempuan PKPI menjadi yang terendah diantara seluruh caleg perempuan dari partai politik lain.

Dukungan Partai Politik

Pada fase ketika sudah ditetapkannya calon anggota legislatif perempuan untuk diikuti sertakan pada Pemilu muncul dinamika baru bagi caleg perempuan, dimana caleg perempuan yang direkrut partai politik mayoritasnya tidak memiliki pengalaman politik.

Penetapan Nomor Urut

Pada tahap pertama setelah ditetapkan sebagai caleg oleh masing-masing partainya, caleg perempuan akan menerima nomor urut sebagai identitas dan senjata yang akan digunakan dalam berkampanye. Fenomena mengejutkan dimana pada Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lingga tahun 2014 tidak ada satu orangpun caleg berjenis kelamin perempuan yang menempati nomor urut 1. Padahal dapat dikatakan bahwa penempatan nomor urut potensial adalah bentuk dukungan awal partai politik kepada caleg yang dicalonkan.

Berdasarkan hasil wawancara maka telah diperoleh informasi bahwa dalam penempatan nomor urut oleh partai, caleg perempuan nyaris

tidak dilibatkan sama sekali. Padahal pengaruh besar posisi nomor urut yang bagus akan membantu caleg perempuan dalam memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Lingga. Posisi nomor urut yang strategis juga sangat diharapkan caleg perempuan akan tetapi sulit karena memang sudah kebijakan partai dan caleg perempuan tidak dalam posisi tawar yang baik karena baru bergabung dengan partai menjelang pemilu akan bergulir.

Pengaruh nomor urut pada Pemilu 2014 memang sedikit banyak akan mempengaruhi kemungkinan seorang caleg untuk terpilih atau tidak. Setidaknya semakin berada pada “nomor kepala” maka peluang untuk menang akan lebih besar daripada berada pada “nomor kaki”. Masyarakat tentu akan memandang bahwa caleg dengan nomor urut 1 sebagai orang besar yang memiliki kemampuan yang tinggi sebagai caleg, begitu juga sebaliknya. Di sisi lain juga perolehan suara caleg pada akhirnya akan diakumulasikan pada fase penetapan caleg terpilih oleh KPU sehingga suara yang diperoleh oleh keseluruhan caleg akan membantu caleg pada posisi “nomor kepala”. Maka dari itu peran nomor urut pada Pemilu 2014 cukup besar dan berpengaruh.

Proses Kampanye

Setelah ditetapkan sebagai caleg, caleg perempuan juga akan melakukan kampanye dengan strategi yang sudah disiapkan dengan harapan dapat memperoleh suara. Parpol di Kabupaten Lingga menyerahkan urusan kampanye kepada masing-masing caleg. Pada saat proses kampanye ini berlangsung, caleg dengan modal politik besar tentu saja memiliki keunggulan dibandingkan dengan caleg lainnya. Modal politik ini nantinya akan mempermudah langkah caleg dalam mendekati diri kepada pemilih, sehingga pemilih merasa simpatik dan ingin memilih caleg bersangkutan.

A partai politik yang menawarkan bantuan langsung dan ada pula yang tidak. Seperti misalnya Partai Demokrat yang menawarkan menyediakan fasilitas pendukung seperti baliho, spanduk, dll bagi caleg perempuan yang mengikuti pemilu di Dapil Lingga 1. Sama halnya dengan Partai Demokrat, Partai Golkar juga menawar-

kan bantuan kepada caleg perempuannya. Caleg perempuan dari dapil Lingga 2 yang pencalonannya didukung dengan disediakannya alat kelengkapan penunjang semisal spanduk, baliho, kalender, dll walaupun yang bersangkutan mengikuti pemilu hanya untuk membantu partai.

Bentuk dukungan fasilitas penunjang kampanye ini merupakan sebuah langkah yang sangat baik dan patut diapresiasi. Apabila seluruh caleg-caleg perempuan memperoleh bantuan fasilitas yang sama tentu saja akan meningkatkan semangat dan memperbesar peluang untuk terpilih. Bantuan demikian juga dapat meringankan beban finansial yang sangat berat yang ditanggung oleh caleg.

SIMPULAN

Dalam menyeleksi dan menetapkan caleg perempuan pada Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memprioritaskan kader-kader perempuan yang bersumber dari keanggotaan partai. Ketiga partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKPI) memiliki kesulitan yang sama yakni pada ketersediaan kandidat caleg perempuan yang ingin dicalonkan. Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat memiliki masalah yang sama dimana kedua partai tersebut memiliki kader perempuan namun tidak bersedia untuk dicalonkan, sehingga membuat partai mengambil langkah untuk merekrut caleg perempuan dari luar partai. Sedangkan rekrutmen caleg PKPI memang bersumber dari luar partai.

Dari segi dukungan partai politik kepada caleg-caleg perempuan yang sudah direkrut dapat dikatakan bahwa dukungan yang diberikan belum dapat mengangkat daya saing caleg perempuan dan sebagian besar caleg perempuan yang ada tidak siap untuk dicalonkan. Adapun ketidaksiapan tersebut dapat dilihat dari posisi nomor urut yang kurang ideal, latar belakang pendidikan, kesulitan dengan kondisi daerah yang berbentuk kepulauan, dan modal finansial. Dengan kondisi tersebut caleg perempuan mengharapkan dukungan fasilitas dan strategi dari partai politik. Meskipun ada bantuan dari partai, namun bantuan tersebut dianggap kurang cukup untuk menunjang caleg perempuan. Sedangkan

terpilihnya Seniy sebagai satu-satunya caleg perempuan terpilih dan memperoleh suara tertinggi merupakan murni karena sudah mempersiapkan diri dengan strategi kampanye dan modal politik yang memadai.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir., 2005, *Pemilu & Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Alimin Siregar., 2007, *Membangun Citra Positif Kaum Perempuan Terhadap Politik*, Unri Press, Pekanbaru.
- Dheyana Hasiholan, dkk., 2007, *Politik dan Perempuan*, Koekosan, Depok.
- Firman Subahyo., 2009, *Menata Partai Politik: Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, RMBOOKS, Jakarta.
- Firmanzah., 2008, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Iskandar., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta.
- Leo Agustino., 2007, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo., 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham., 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romany Sihite., 2007, *Perempuan, Kesenjangan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajawali Press, Jakarta.
- Roskin, Michael G, et al., 2006, *Political Science: An Intruduction*, Pearson Education International, New Jersey.
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip., 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sigit Pamungkas., 2012, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarisme, Yogyakarta.
- Sugiono., 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.